

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH BESAR DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF
(Studi Pada Program Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Seulimeum
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**REISHANDA
NIM. 190802076**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reishanda
NIM : 190802076
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 11 September 2001
Alamat : Ds. Lamjruen, Kec. Seulimeum, Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2023

g Menyatakan,



Reishanda

NIM. 190802076

PENGESAHAN PEMBIMBING

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH BESAR DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF
(Studi Pada Program Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Seulimeum
Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**REISHANDA
NIM. 190802076**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

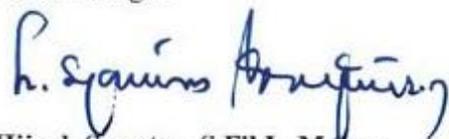
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

Pembimbing II



Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

PENGESAHAN SIDANG

**PERAN DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH BESAR DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF
(Studi Pada Program Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Seulimeum
Kabupaten Aceh Besar)**

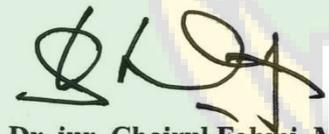
SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023
29 Dzulhijjah 1444

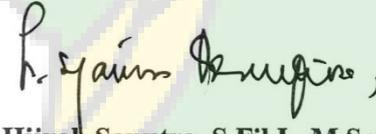
Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



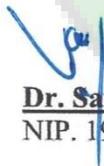
Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

Sekretaris,



Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

Penguji I,



Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 1961100519822031007

Penguji II,



Safwan, SE, M.Si
NIDN. 1321017801

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S.Ag. M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Aceh dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Aceh Besar mencapai 409,527. Tingkat pendidikan di Kabupaten Aceh Besar masih sangat rendah, minimnya minat belajar masyarakat Aceh Besar di sebabkan oleh tingginya biaya dan kebutuhan pendidikan yang tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat. Dan juga masih banyak angkatan kerja di Aceh Besar yang menganggur atau sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program usaha ekonomi produktif dan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program usaha ekonomi produktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu menggambarkan usaha ekonomi produktif adalah bantuan stimulan yang diberikan bagi mereka yang sudah memiliki usaha maupun tujuan untuk meningkatkan kemandirian, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi dan produktivitas kerja. Mekanisme penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif yaitu pendataan, peninjauan, sosialisasi dan pendampingan sosial. Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program usaha ekonomi produktif pelaksanaannya sudah berjalan dengan optimal. Namun, dalam pelaksanaan program usaha ekonomi produktif masih ada hambatan yaitu ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sehingga masih ada hal-hal yang harus diperbaiki kedepannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya bantuan usaha ekonomi produktif memberi dampak yang baik bagi fakir miskin yang menerima.

Kata Kunci : *Peran, Dinas Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, Program Usaha Ekonomi Produktif, Kabupaten Aceh Besar.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam kita hantarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan berbagai pihak penyelesaian skripsi ini tidak tercapai. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku pembimbing pertama yang telah

memberikan masukan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. selaku pembimbing kedua yang telah mengarahkan serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Alm. Tajuddin yang peneliti sayangi dan rindukan, ibunda tercinta Evi Yusnita terimakasih atas kasih sayang dan senantiasa mendoakan, memberikan dukungan moril maupun materil, memberikan semangat dan menasehati dengan setulus hati.
8. Saudara-saudari Furi Nurul Akla, S.T., Wildan Khairi, Muhammad Reifanda, Ghefira Salsabila, dan Azzahra Agilya yang selalu memberikan semangat serta bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para sahabat Manna Wassalwa, Putri Raisa, Ulfaturrahmi, Sarah Faradilla dan Ainil Farhani yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2019 yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman KPM Mesjid Tuha yang telah menemani dan membantu dalam suka maupun duka, serta memberikan motivasi dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Ahmad Sina Reza, S.Sn yang selalu meluangkan waktu untuk diajak

diskusi mengenai permasalahan dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dalam penulisan ataupun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, sehingga peneliti membutuhkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pada masa depan hingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT membalas segala amal kebaikan semua pihak yang telah mendukung, membantu dan menyelesaikan skripsi ini.

Banda Aceh, 10 Juli 2023
Penulis,

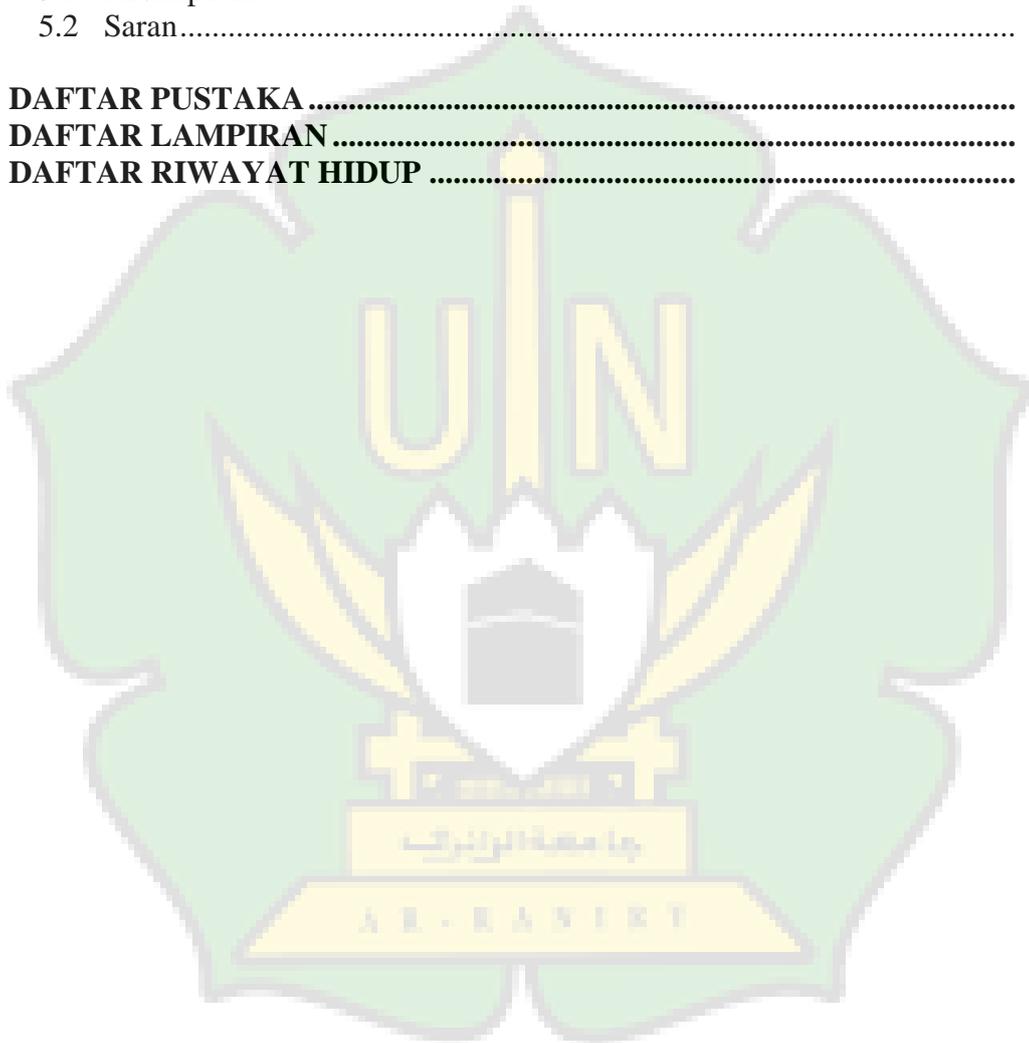
Reishanda



DAFTAR ISI

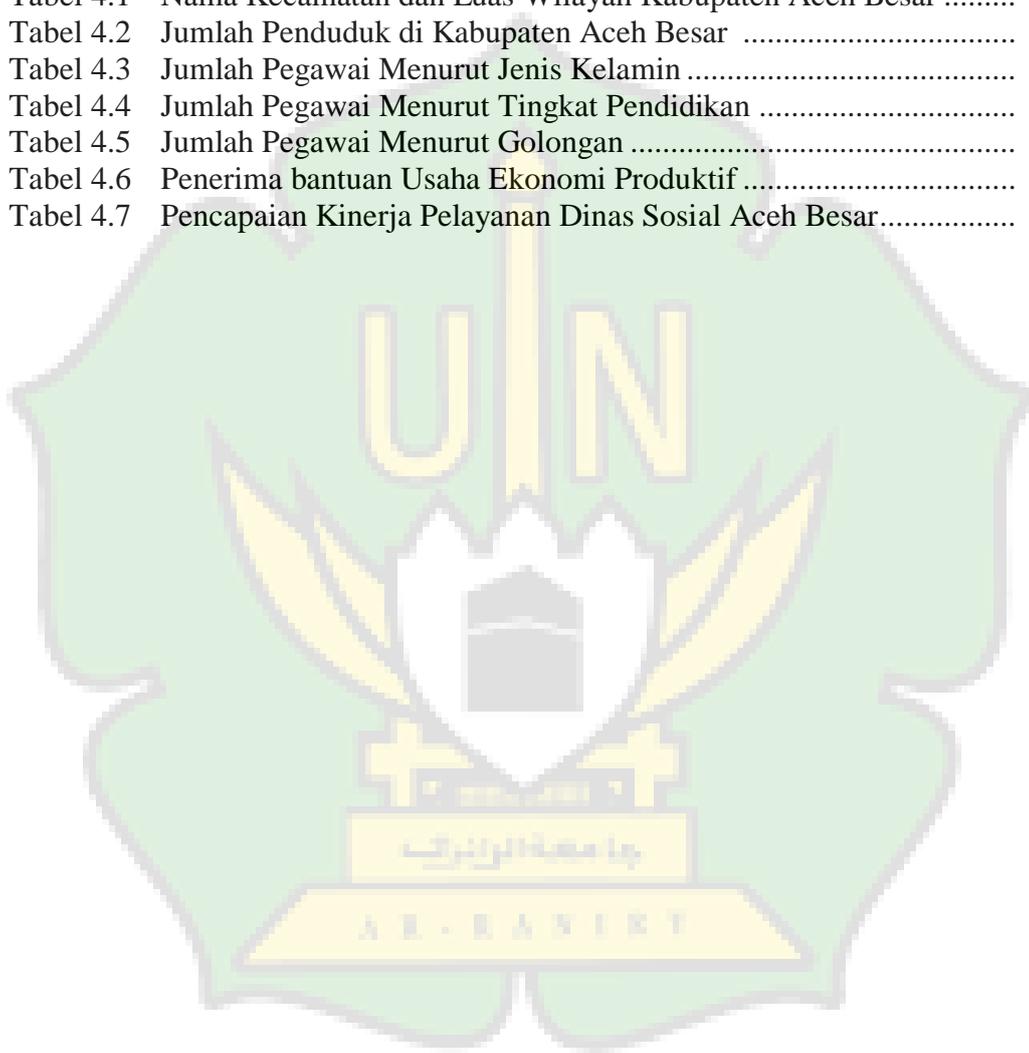
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Penjelasan Istilah.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Teori Peran	17
2.3 Teori Kesejahteraan Masyarakat	21
2.4 Teori Kemiskinan	25
2.5 Program Usaha Ekonomi Produktif	27
2.6 Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Pendekatan Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian	32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.4 Sumber Data	33
3.5 Informan Penelitian	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	36
3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	40

4.2 Pembahasan.....	49
4.2.1 Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif.....	49
4.2.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif.....	60
BAB V PENUTUP.....	65
5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Besar	3
Tabel 1.2	Jumlah Tingkat Pengangguran di Kabupaten Aceh Besar	5
Tabel 3.1	Fokus Penelitian	28
Tabel 3.2	Informan Penelitian	30
Tabel 4.1	Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar	38
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Besar	38
Tabel 4.3	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	40
Tabel 4.4	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	40
Tabel 4.5	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	40
Tabel 4.6	Penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif	52
Tabel 4.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Aceh Besar.....	52



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Besar	4
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Aceh Besar	36
Gambar 4.2	Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar	39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing	62
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	63
Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian	64
Lampiran 4. Rincian Barang Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	65
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian	68
Lampiran 6. Draf Wawancara	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah sosial yang masih harus dihadapi setiap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ekonomi yang terjadi meningkat. Namun masih ada masalah sosial yang terjadi. Sehingga menjadikan Indonesia terus menjadi negara berkembang. Hal ini terjadi dikarenakan adanya ketimpangan sosial, pendidikan rendah, kreativitas yang sangat rendah, keinginan kurang memperbaiki diri dan sebagainya.

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi terdiri dari sandang, pangan dan papan.¹

Secara umum kemiskinan disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam ada faktor eksternal dan internal . Faktor Eksternal adalah adanya ketidak samaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas. Selain itu faktor internal, tingkat pendidikan yang rendah dan sempitnya peluang dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga memengaruhi tingginya tingkat

¹ Abu Ahmad, *Ilmu Sosial Dasar* (jakarta: Remika cipta, 2003), h.344.

pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran disuatu negara ini yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan.²

Kemiskinan dan pembangunan adalah sumbu yang tidak bisa dipisahkan dan saling berpengaruh satu sama lain. Pembangunan di Indonesia merupakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 tujuannya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.³

Pembangunan di Indonesia yang dilakukan secara terus menerus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan merata. Hasil pembangunan yang dilakukan secara bertahap diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari segi struktur sosial ekonomi maupun budaya. Namun hasil dari kegiatan pembangunan tersebut belum mampu menghilangkan secara tuntas masalah kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di kabupaten Aceh Besar per Maret 2021 meningkat menjadi 14,05 persen dibandingkan Maret 2020 yaitu 13,84 persen.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui tingkat perekonomian masyarakat pada wilayah tertentu. Kabupaten Aceh Besar memiliki kontribusi besar tetapi pertumbuhannya lambat dikarenakan keterbatasan untuk memperoleh akses permodalan. Keterbatasan untuk mengakses permodalan mempengaruhi kemampuan usaha

² Sri Edi Suwarsono. *Sekitar kemiskinan dan keadilan* (Jakarta : Cendekiawan Tentang Islam UI Press, 2007), h. 24

³ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), h. 43

masyarakat untuk berkembang. Oleh karena itu keterbatasan mengakses modal dapat menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Seperti diketahui bahwa kondisi kemiskinan Kabupaten Aceh Besar dilihat dari jumlah persentase penduduk miskin masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengatur bagaimana penyelenggaraan tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat”. Dan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi”.⁴

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Besar

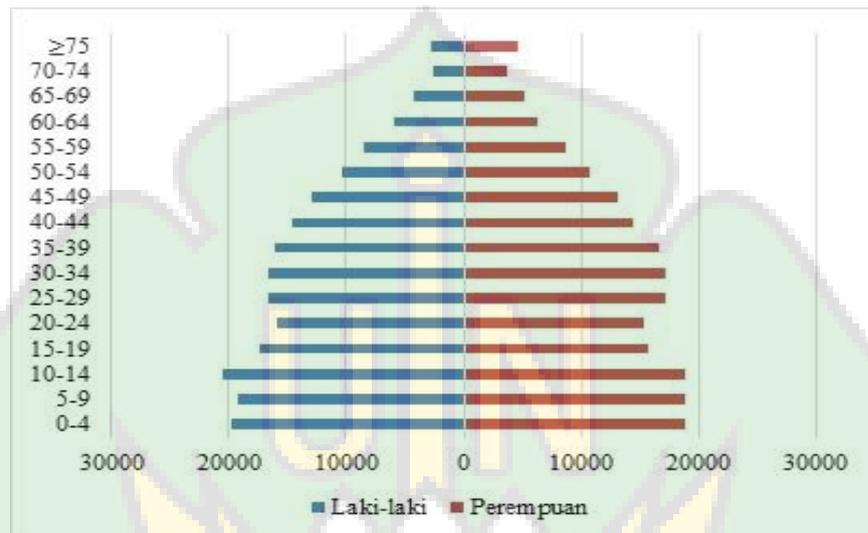
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		
2020	2021	2022
59,70	60,26	58,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2023

Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten di Aceh dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di Aceh Besar pada tahun 2021 mencapai 409,527 jiwa. Namun, tingkat pendidikan di Kabupaten Aceh Besar masih sangat rendah, bahkan masyarakat

⁴ Peraturan Perintah Nomor 39 Tahun 2012 *Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, pasal 2 ayat 1 dan 2.

Aceh Besar banyak yang tidak menyelesaikan sekolah dasar (SD), padahal pemerintah Indonesia telah menentukan wajib belajar 12 tahun. Minimnya minat belajar masyarakat Aceh Besar disebabkan oleh tingginya biaya dan kebutuhan pendidikan yang tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat.



Gambar 1.1 Piramida Penduduk Kabupaten Aceh Besar 2021

Sumber: Kabupaten Aceh Besar, 2023

Berdasarkan piramida penduduk pada gambar di atas, penduduk pada Kabupaten Aceh Besar saat ini didominasi oleh penduduk yang berusia produktif (penduduk berusia 15-64 tahun) yaitu 270.514 jiwa atau sebesar 65,96%. Piramida tersebut tergolong piramida ekspansif (muda). Artinya sebagian besar penduduk berusia muda, sedangkan penduduk usia lanjutnya sedikit. Sehingga diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi jumlah angkatan kerja yang ada.

Masih banyak angkatan kerja di Aceh Besar yang menganggur atau sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingginya angka

pengangguran tersebut dapat disebabkan oleh meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak sejalan dengan perluasan lapangan pekerjaan.

Tabel 1.2
Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Besar

Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)		
2020	2021	2022
7,62	7,70	8,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2023

Salah satu program prioritas dan strategis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam upaya penanganan masalah kemiskinan adalah program pemberdayaan keluarga miskin. Dengan adanya pola pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan sosial berupa Usaha Ekonomi Produktif. Pemerintah dalam melakukan program pengentasan kemiskinan cenderung melihat penyebab kemiskinan dari aspek ekonomi yaitu rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Pengelolaan bantuan ini diarahkan untuk mengembangkan dan menggerakkan sektor ekonomi yang merupakan salah satu kekuatan bersama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang dapat menjadikan masyarakat lebih efisien dan efektif. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat melakukan kegiatan sosial untuk memperbaiki keadaan dan kondisi kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara untuk melakukan pembangunan sosial. Pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam membentuk dan mengubah perilaku masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih tinggi.

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Usaha ekonomi produktif merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan, yang akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Kegiatan usaha ekonomi produktif dilaksanakan dalam bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin dengan pendekatan individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada program usaha ekonomi produktif dengan pendekatan keluarga di Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar. Pengelolaan bantuan usaha ekonomi produktif diarahkan untuk mengembangkan dan menggerakkan sektor ekonomi yang merupakan salah satu kekuatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Penyaluran bantuan modal usaha ekonomi produktif di Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar diberikan dalam bentuk barang, seperti; mesin jahit, alat membuat kue, perlengkapan kios, perlengkapan jualan kopi, dan sebagainya. Berdasarkan hasil observasi peneliti, bahwa pelaksanaan program bantuan modal usaha ekonomi produktif belum berjalan dengan maksimal, karena banyak terlihat alat bantuan yang terbengkalai dan usaha tidak berlanjut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif’.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini berkenaan dengan peran Dinas Sosial Aceh Besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Produktif yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi: Meskipun Aceh Besar memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih relatif tinggi, mencapai 14,05 persen pada Maret 2021. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan belum memberikan hasil yang maksimal.
2. Rendahnya tingkat pendidikan: Tingkat pendidikan di Kabupaten Aceh Besar masih sangat rendah, dengan banyak penduduk yang tidak menyelesaikan Sekolah Dasar (SD). Hal ini dapat menjadi hambatan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Tingginya tingkat pengangguran: Masih terdapat banyak angkatan kerja di Aceh Besar yang menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Hal ini berdampak pada pendapatan masyarakat dan mempersulit mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.
4. Keterbatasan akses permodalan: Keterbatasan akses terhadap modal usaha menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan usaha masyarakat untuk berkembang. Minimnya akses permodalan dapat menghambat

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

5. Kualitas dan efektivitas program pengentasan kemiskinan: Program pemberdayaan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang telah dilakukan pemerintah Aceh Besar belum memberikan hasil yang optimal dalam mengentaskan kemiskinan. Diperlukan evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas program-program tersebut.
6. Pengelolaan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP): Mekanisme penyaluran bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif oleh Dinas Sosial perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat miskin yang berusaha mandiri.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program usaha ekonomi produktif?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan program usaha ekonomi produktif?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program usaha ekonomi produktif.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program usaha ekonomi produktif.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai rekomendasi dan bahan masukan bagi pemerintah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen dalam memperluas ilmu pengetahuan dan referensi yang hanya berisi paparan nyata di lapangan yang bersangkutan dengan peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.6 Penjelasan Istilah

Adanya beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi “Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif”. Maka dari itu peneliti menjelaskan definisi dari istilah tersebut sebagai berikut:

1. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dijalankan atau dimainkan.⁵
2. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan menggambarkan

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

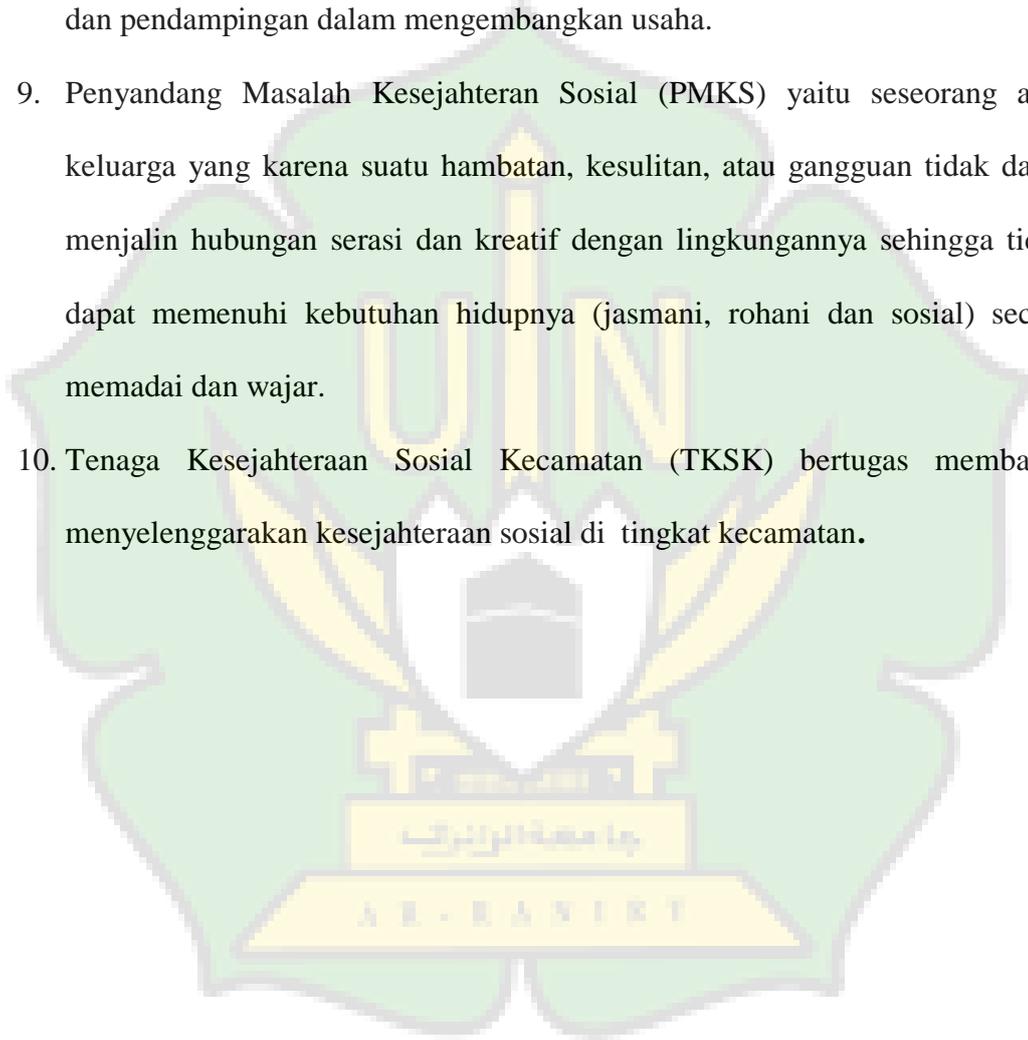
kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan atau menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan dan papan.⁶

3. Tingkat kemiskinan: indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini dapat mencakup tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, atau kriteria lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait.
4. Tingkat pendidikan: Merujuk pada tingkat pencapaian pendidikan seseorang atau kelompok. Hal ini dapat diukur berdasarkan tingkat pendidikan formal yang telah diselesaikan.
5. Tingkat pengangguran: Mengacu pada proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan.
6. Akses permodalan: Merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk memperoleh modal atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan usaha.
7. Kesejahteraan sosial merupakan sistem yang telah dirancang dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dibangun untuk membantu masyarakat guna mendapatkan standar hidup dan kesehatan yang memadai, serta relasi-relasi individu dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.⁷

⁶ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal.9.

⁷ Fahrudin, A. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, 9Baandung: PT. Rafika Aditama, 2012).

8. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan kegiatan usaha yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Program usaha ekonomi produktif ini melibatkan pemberian bantuan modal, pelatihan keterampilan dan pendampingan dalam mengembangkan usaha.
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat menjalin hubungan serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.
10. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bertugas membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian “Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)” sebagai berikut:

1. Ria Rizqy Wardianti (2019), dalam penelitiannya yang berjudul “*Peran Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)*”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian dapat diketahui ada tiga yaitu *pertama*, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan memberikan modal kepada kelompok masyarakat untuk membuka usaha, dan juga bekerjasama dengan pengusaha lainnya untuk diberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat untuk mengsejahterakannya dengan meningkatkan penghasilan. *Kedua*, kelompok usaha bersama ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan pengetahuan, sosial psikologi, keterampilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, itu semua akan diwujudkan dengan adanya pendapatan

bertambah, adanya pemberian informasi, mendapatkan motivasi, dan melakukan hubungan baik dengan banyak pihak. *ketiga*, kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan akan melakukan pertemuan rutin, melatih keterampilan dari segi modal yang diberikan untuk mengembangkan usahanya.

Persamaan dari penelitian Ria Rizqy Wardianti dan peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Ria Rizqy Wardianti berfokus pada peran kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga program bantuan usaha dalam bentuk kelompok atau disebut dengan kelompok usaha bersama (KUBE), sedangkan peneliti berfokus pada peran dari Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan program usaha ekonomi produktif dengan pendekatan individu/keluarga.

2. Meilisa Twin Nabila (2020), dalam penelitian yang berjudul “*Peran Kelompok Usaha Bersama Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Program Keluarga Harapan Desa Wringinanom, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)*”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan langsung di lapangan atau yang dinamakan dengan field reserch. Untuk Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa: *pertama*, penerapan pemberdayaan sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada

dalam pemberdayaan, dari dimulai dengan memberikan motivasi untuk jiwa, selanjutnya menemukan produk apa yang akan diproduksi dengan disesuaikan potensi yang dimiliki di daerah tersebut, dan sampai padatahap memproduksi dan hingga memasarkan produk tersebut. *Kedua*, untuk kesejahteraan dan menjadikan masyarakat yang mandiri banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dari pelaksanaan program kelompok usaha bersama. Program ini membuat masyarakat mengalami peningkatan pendapatan untuk kelangsungan hidupnya. Bukan hanya itu tetapi wawasan masyarakat dalam usaha semakin meningkat dalam manajemen usahanya. Berhasilnya Program kelompok usaha bersama dapat dilihat dari, masyarakat menjadi sejahtera dan mandiri.

Persamaan dari penelitian Meilisa Twin Nabila dan peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Meilisa Twin Nabila berfokus pada peran kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga program bantuan usaha dalam bentuk kelompok atau disebut dengan kelompok usaha bersama (KUBE), sedangkan peneliti berfokus pada peran dari Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan program usaha ekonomi produktif dengan pendekatan individu/keluarga.

3. Heryanti (2019), dengan judul penelitian *“Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)”*. Penelitian ini menggunakan

metode Penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bone telah melaksanakan perannya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bone setiap tahunnya. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan yakni kurangnya anggaran dari pemerintah, kurangnya sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan.

Persamaan dari penelitian Heryanti dan peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang peran Dinas Sosial. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Heryanti menggunakan metode Penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

4. Diah Ayu Ningrum (2017), dengan judul penelitian "*Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Menangani Kemiskinan di KUBE Sejahtera Desa Giripurno, Ngadirejo, Temanggung.*" Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan langsung di lapangan atau yang dinamakan dengan field reserch. Untuk Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa: peran kelompok usaha bersama belum efektif, peran kelompok usaha bersama sudah mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat, tetapi dalam pengurus rendahnya pendidikan.

Persamaan dari penelitian Diah Ayu Ningrum dan peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang menangani kemiskinan. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Diah Ayu Ningrum berfokus pada peran kelompok usaha bersama dalam menangani kemiskinan, sedangkan peneliti berfokus pada peran dari Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan.

5. Fenny Rifka Simbolon (2020), dengan judul penelitian *“Peranan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penerima Kube Di Desa Paindoan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir.”* Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa: Penerapan kelompok usaha bersama di desa tersebut tidak efektif karena masih ada beberapa indikator yang belum bisa di implementasikan. Yang hanya dapat diterapkan yaitu pemberian modal sedangkan untuk mendampingi dan melatih belum dilaksanakan. Tetapi walaupun begitu untuk kesejahteraan masyarakat dalam mengikuti KUBE mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan.

Persamaan dari penelitian Fenny Rifka Simbolon dan peneliti yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu pada penelitian Fenny Rifka Simbolon berfokus pada peran kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan juga program bantuan usaha dalam bentuk kelompok atau disebut dengan kelompok usaha bersama (KUBE), sedangkan

peneliti berfokus pada peran dari Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dan program usaha ekonomi produktif dengan pendekatan individu/keluarga.

2.2 Teori Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁸ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁹

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu dalam masyarakat, kedudukan dimana dapat dipunyai pribadi atau kelompok-kelompok. Peran itu bersifat sosiologis, pribadi yang mempunyai peran dinamakan pemegang peranan (role occupant) dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan, dapat sesuai

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

⁹ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen* (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan didalam kaidah-kaidah. Dikatakan juga bahwa pemegang peranan adalah subjek hukum.¹⁰

Dalam pemahaman teori peran dan pemahaman peranan sebenarnya sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Pandangan ini sangat tergantung sisi yang mana seharusnya dibidik.

Adapun syarat-syarat peran menurut Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemsyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹¹

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah “Memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat,

¹⁰ Sukanto, soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: CV.Rajawali, 2006, hal.60.

¹¹ Soejono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hal. 269.

dan menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat”.¹²

Selanjutnya dalam Suhardono menyebutkan peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/unjuk peran (role performance).¹³

2.2.2 Dimensi Peran

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan: Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi: Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi: Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan prefensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa: Peran didayagunakan sebagai

¹² Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) Hal. 160.

¹³ Suhardono, Edi, *Teori Peran*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2012) Hal. 237.

suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.¹⁴

2.2.3 Jenis-jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran

¹⁴ Heroepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003), hal. 67

nyata (Anacted Role) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

2.3 Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dapat diartikan jika suatu kondisi seseorang sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kemampuan untuk bisa mengikuti pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai untuk menunjang kualitas hidup seseorang sehingga memiliki kesetaraan sosial yang sama terhadap masyarakat yang lainnya. Berdasarkan hak asasi manusia, pengertian kesejahteraan yaitu bahwa setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan, pemuda atau anak-anak mempunyai hak untuk hidup dengan layak baik itu aspek Kesehatan, makanan, minuman, tempat tinggal, dan sosial, jika hal tersebut atau salah satu dari hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa seseorang telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia.¹⁵

Kesejahteraan masyarakat yaitu keadaan suatu masyarakat yang mana bisa diukur dari standar kehidupan masyarakat sendiri. Kesejahteraan sosial yaitu sistem yang telah dirancang dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dibangun untuk membantu masyarakat guna mendapatkan standart hidup dan Kesehatan yang memadai dan relasi-relasi individu dan sosial sehingga

¹⁵ Basri, . A. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta: Gema insani Press, 2005).

memungkinkan mereka dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.¹⁶

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan bisa meningkatkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Jadi berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan diatas bahwa kesejahteraan masyarakat itu dapat diukur dari kemampuan dalam mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya.

Sumber daya yang dimiliki bisa dijadikan pencapaian tingkat kesejahteraan yang tinggi juga, jika hal tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik untuk tingkat kepuasan. Suatu masyarakat yang sejahtera bisa dilihat dari tidak adanya kondisi yang akan menempatkan aspek paling penting dari terpenting. Faktor kesejahteraan bukan hanya diukur dari segi ekonomi saja tetapi juga dari segi lainnya seperti sosial, budaya, dan politik.

Menurut Badan Pusat Statistik, pendapatan per kapita, tingkat kesehatan dan pendidikan, serta ketersediaan sumber daya individu atau keluarga sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi yang dimilikinya. Ekonomi masyarakat yang makmur ditunjukkan dengan pendapatan per kapita yang tinggi, sedangkan ekonomi masyarakat yang kurang makmur ditunjukkan dengan pendapatan per kapita yang rendah. Adapun aspek yang mempengaruhi kesejahteraan individu maupun masyarakat antara lain:

¹⁶ Fahrudin, A. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2012).

1. Pangan, merupakan makanan sehari-hari yang sangat penting untuk pertumbuhan kesehatan jasmani dan rohani dalam membentuk setiap individu dan keluarga yang cerdas, sehat dan kuat. Oleh karena itu, keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi dan menyediakan kebutuhan pangan yang bermutu.
2. Sandang, merupakan salah satu kebutuhan pokok dan kelengkapan hidup bagi setiap individu dan keluarga, maka diperlukan adanya pemenuhan sandang dalam jumlah yang cukup dan sehat.
3. Perumahan, merupakan tempat berteduh dan berlindung serta dapat memberikan rasa hidup tenteram, aman dan bahagia. Oleh sebab itu perlu diusahakan perumahan yang memenuhi kesehatan teratur, dan lingkungan untuk meningkatkan rasa bahagia, tenang dan mutu hidup.
4. Pendidikan, untuk membentuk manusia seutuhnya berdasarkan pancasila, maka mutlak setiap individu dan keluarga mengecap pendidikan sebagai dasar kesejahteraan. Minimal setiap individu dan keluarga menempuh pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan standar terendah dari sebuah keluarga sejahtera.
5. Kesehatan, kesehatan merupakan syarat mutlak untuk kebahagiaan hidup, karena itu perlu dihayati bagaimana cara memelihara kesehatan itu baik pribadi maupun keluarga. Oleh karena itu, keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan mandiri.¹⁷

¹⁷ Natalia, Intan Indra. 2016. *Kajian Tingkat Kesejahteraan dan Pendidikan Anak Petani Salak Pondoh di Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara*. Skripsi Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Untuk mengsejahterakan keluarga ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang mana belum bisa memenuhi kebutuhan pokok secara manual, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan.
2. Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi.
3. Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi; tabungan keluarga, makan bersama sambil komunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (minimal enam bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, dan menggunakan sarana transportasi.
4. Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial, psikologi dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat

memberikan sumbangan yang teratur kepada masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

5. Keluarga Sejahtera III Plus, yaitu keluarga yang sudah dapat memenuhi beberapa indikator, seperti; aktif memberikan sumbangan secara teratur dengan sukarela, memberikan sumbangan materi untuk kegiatan-kegiatan sosial, dan anggota keluarga secara aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

2.4 Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang telah lama ada dan hadir ditengah-tengah kita saat ini. Sebagai negara berkembang Indonesia termasuk menghadapi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai pembangunan lainnya, oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok yang tidak dapat ditunda lagi penanggulangannya dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Kemiskinan adalah taraf hidup yang rendah atau suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakatnya di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang maupun papan. Ketidakmampuan pendapatan yang

rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan dan standar pendidikan.¹⁸

Definisi kemiskinan umumnya diartikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk material uang yang diterima seseorang namun kemiskinan juga ditandai dengan kondisi yang serba kekurangan. Kekurangan dalam hal pendidikan, kesehatan yang buruk dan transportasi yang dibutuhkan kurang. Golongan-golongan miskin yang dialami oleh mereka yang mempunyai status ekonomi dalam sudut pandang status berada di lapisan bawah.

Menurut Soerjono Soekanto Kemiskinan dapat di artikan keadaan seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.¹⁹

Menurut Chriswardani, kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:²⁰

- 1) **Kemiskinan Absolut**, yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari seseorang yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Ukuran ini dikaitkan dengan batasan pada kebutuhan pokok atas kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Seseorang yang mempunyai pendapatan di bawah kebutuhan minimum maka seseorang dapat dikatakan miskin.

¹⁸ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2011), Hal. 788.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Bumi aks ara, 2004) , Hal. 329.

²⁰ Chriswardani., S. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional Understanding Multidimension Of Poverty*, JMPK. Vol. 08. No. 03.

- 2) Kemiskinan Relatif, yang berkaitan dengan distribusi pendapatan yang mengukur ketidakmerataan. Dalam kemiskinan relatif ini, seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan minimumnya belum tentu disebut tidak miskin. Kondisi seseorang atau keluarga apabila dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya mempunyai pendapatan yang lebih rendah, maka orang atau keluarga tersebut berada dalam keadaan miskin.
- 3) Kemiskinan Kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- 4) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

2.5 Program Usaha Ekonomi Produktif

Fokus pembangunan kesejahteraan sosial dalam pengentasan kemiskinan adalah melaksanakan kegiatan nasional untuk mengentaskan kemiskinan. Kemajuan suatu daerah tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pembangunan. Pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai tanggung jawab mensejahterakan rakyat, meningkatkan kualitas hidup dan ikut serta dalam menanggulangi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat yaitu masalah kemiskinan. Pemerintah pusat maupun daerah dapat melakukan program-

program sebagai bentuk upaya untuk mendukung perekonomian salah satunya melakukan program bantuan stimulan atau modal usaha ekonomi produktif.

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maupun daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.²¹

Usaha ekonomi produktif diberikan oleh Kementerian Dinas Sosial Penangan Fakir Miskin dalam program bantuan sosial. Usaha ekonomi produktif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penanganan terhadap fakir miskin agar bisa meningkatkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pendapatan dan menghasilkan kerja sama usaha yang saling menguntungkan. Program usaha ekonomi produktif dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan kepada masyarakat fakir miskin dengan pendekatan individu, keluarga dan kelompok. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dan memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing, meningkatkan budaya untuk berbisnis, mengembangkan akses pasar, dan menjalin kemitraan ekonomi.

²¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 *Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin*, Pasal 1.

Kriteria penerima manfaat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yaitu:²²

1. Fakir miskin yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
2. Adanya embrio usaha;
3. Berusia 18-60 tahun;
4. Memiliki kemauan, potensi, dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu.

Tujuan umum dari penyelenggaraan program usaha ekonomi produktif (UEP) sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses industrialisasi, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang disertai penguatan lembaga.
3. Meningkatkan peran masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
4. Meningkatkan keberdayaan dan kualitas masyarakat pedesaan, sebagai salah satu modal sosial berupa jaringan kerja sama untuk memperkuat posisi tawar.

²² Syawie, dkk. (2018). *Pengaruh Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Terhadap Tingkat Kemandirian Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Pesisir*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

5. Peningkatan dukungan bagi pembentukan dan pengembangan Kluster industri berbasis teknologi serta peningkatan dukungan bagi penerapan teknologi tepat guna.
6. Program pengembangan komoditi unggulan daerah.

Indikator keberhasilan pemberian bantuan stimulan UEP meliputi:

1. Meningkatnya modal usaha penerima manfaat bantuan stimulan UEP.
2. Meningkatnya penghasilan/pendapatan keluarga.
3. Terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga secara layak.
4. Adanya tabungan penerima manfaat bantuan.
5. Adanya Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS).

2.6 Kerangka Pemikiran

Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif
(Studi pada Program Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program Usaha Ekonomi Produktif?

Teori Utama

Teori Peran

Fokus Penelitian

-Peran
-Hambatan

Teori Pendukung

-Teori Kesejahteraan Masyarakat
-Teori Kemiskinan
-Program Usaha Ekonomi Produktif

Kesimpulan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan data-data fenomena yang terjadi di lapangan secara aktual dan mengamati secara seksama, kemudian peneliti menganalisis data-data tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini disebut non-eksperimen, karena penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian.²³

Adapun pendapat terhadap metode kualitatif Soetanyo menyebutkan bahwa “Metode kualitatif ini dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, namun mendalam (*in depth*) dan total/menyeluruh (*holistic*), dalam arti tak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif yang kita kenali dengan variabel”.²⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang didapat dari lapangan. Penelitian lapangan adalah “Sebuah penelitian yang sumber daya dan proses penelitiannya menggunakan kancha atau lokasi tertentu sesuai dengan yang dipilih.”²⁵

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 107

²⁴ Soetanyo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Grasindo, 2012), Hal. 65

²⁵ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), Hal.56.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif secara umum fokus penelitian sebagaimana Moleong menyebutkan “Fokus adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. *Implikasinya*, apabila peneliti merasakan adanya masalah, seyogyanya ia mendalami kepustakaan yang relevan sebelum terjun lapangan. Dengan jalan demikian fokus penelitian akan memenuhi kriteria untuk bidang ikuri yaitu kriteria inklusi-inklusi atau implikasi yang lain memanfaatkan paradigma”.²⁶

Fokus penelitian ini dilakukan agar mampu melakukan pemusatan diri terhadap objek penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melihat gejala dan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di lapangan, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Peran	a) Regulator b) Dinamisator c) Fasilitator	Jumratul Islamiyah (2020), <i>Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Gowa.</i>
2	Hambatan	a) Kurangnya alokasi dana b) Belum tepat sasaran penerima bantuan	Nur Ilham (2021), <i>Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin.</i>

²⁶ Moleong, j. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Hal. 97.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang dibutuhkan, peneliti melakukan penelitian langsung di Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti menjadikan tempat tersebut menjadi lokasi penelitian karena dinas sosial kabupaten Aceh Besar sebagai penyalur program bantuan Usaha Ekonomi Produktif, dan juga salah satu institusi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Sumber Data

Sumber data penelitian ini peneliti menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat memanfaatkan efisien waktu. Untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan dua sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari objek penelitian atau sumber utama yang diperoleh secara langsung dari tempat lokasi penelitian melalui instrument observasi dan wawancara.²⁷

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung, Alfabeta, 2015), Hal. 187.

sumbernya seperti dari sumber jurnal, buku dan dokumen dari pihak instansi terkait. Sebagaimana pendapat Sugiyono menyebutkan bahwa “Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data semisal lewat dokumen atau wawancara dengan individu dalam lingkungan tempat.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih peneliti dalam upaya memperoleh bahan dan data-data penelitian lapangan yang dilakukan secara sengaja, sebagaimana pendapat Moleong menyebutkan bahwa “Penentuan informan memiliki beberapa kriteria yaitu harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan tertentu tentang suatu hal atau tentang peristiwa yang terjadi”.²⁸

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar	1 orang
2	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 orang
3	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1 orang
4	Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	1 orang
5	Keluarga Penerima Manfaat	5 orang
Jumlah		9 orang

Sumber: Data Diolah Tahun 2023

²⁸ Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Hal. 90.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan upaya untuk pengumpulan data yang dilakukan ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan, sehingga sebagaimana pendapat Sutopo menyebutkan bahwa “Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi”.²⁹

²⁹ Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Hal. 280.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.³⁰

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti dalam menganalisa data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan analisis deskriptif, sebagaimana pandangan Moleong menyebutkan “Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja”.³¹

Selanjutnya Miles dan Huberman dalam Sugiyono juga menyebutkan “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sentesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

³⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Antari Press: Banjarmasin, 2011) Hal. 71.

³¹ Moleong, Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), Hal 280.

Sebagai penegasan sebagaimana menurut Miles dan Humberman dalam Saldana menyebutkan bahwa “Di dalam analisis data kualitatif terdapat 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktifitas dalam aktifitas data yaitu data condensation, data display dan conclusion drawing/verification”.³²

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman;

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang

³² Saldana, Humberman dan Miles, *Analisis data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), Hal 31-33.

kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.³³

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini uji keabsahan data melalui uji kredibilitas (*credibility*). *Credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.³⁴ Dalam teknik pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti perlu memperpanjang pengamatannya karena jika hanya sekali datang ke lokasi penelitian akan sulit mendapatkan *link* atau *chemistry* dengan para partisipan. Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data.

2. Ketekunan Pengamatan

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus mengumpulkan data yang benar, aktual dan lengkap. Peneliti harus menunjukkan kegigihannya dalam memperoleh data yang sudah ada untuk memperdalamnya dan hal yang belum ada terus diupayakan keberadaannya. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan dan kegigihan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

³³ Djaman Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013) Hal 68.

³⁴ Wijaya, Hengki & Helaluddin, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), Hal.134.

3. Triangulasi

Pengecekan dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang ini dilakukan sebelum atau sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) strategi, yaitu sebagai berikut :

1) Triangulasi Sumber

Peneliti mencari informasi lain tentang topik yang dikajinya dari sumber atau partisipan lain. Pada prinsipnya, semakin banyak sumber maka akan semakin baik hasilnya.

2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode ini merupakan jenis triangulasi dengan memadukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menganalisis data penelitian.

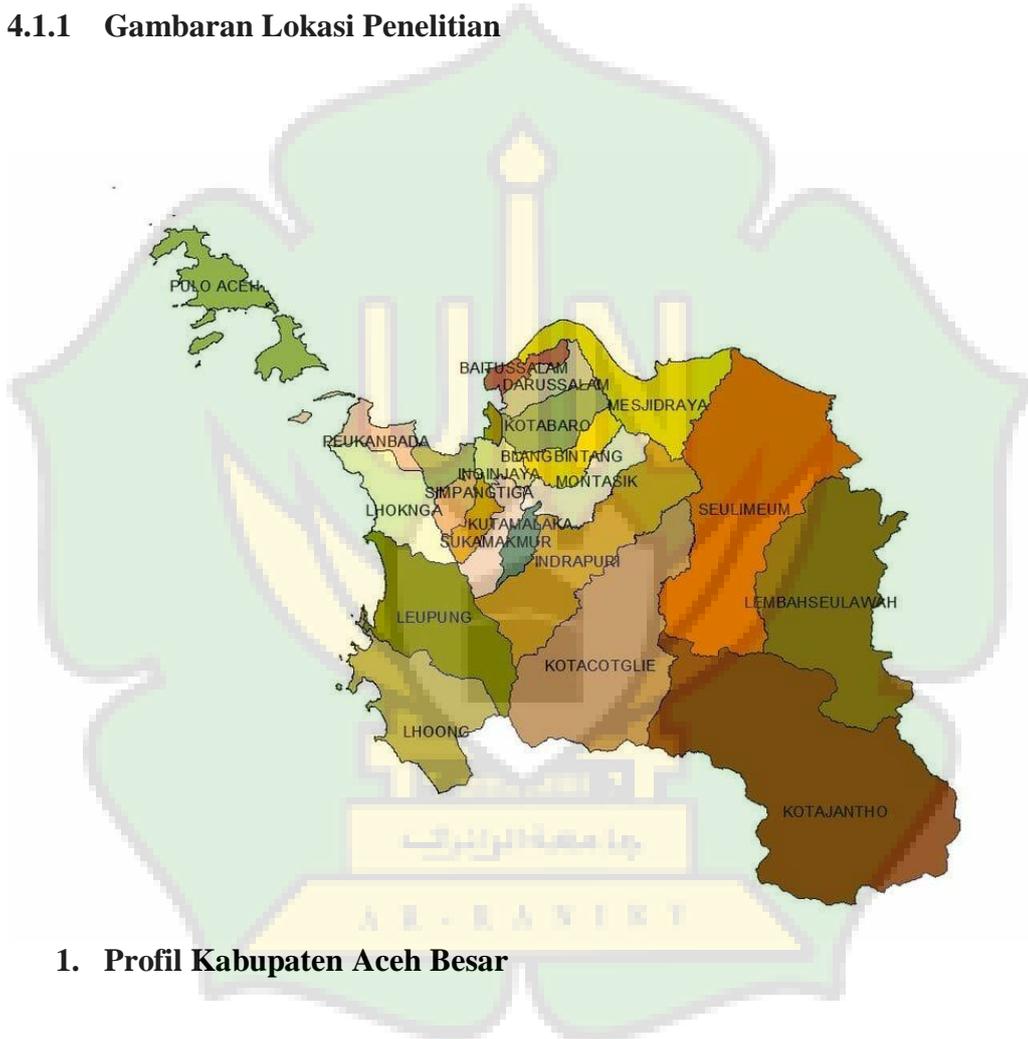
3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini melakukan pengecekan pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian



1. Profil Kabupaten Aceh Besar

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Aceh Besar

Sumber: <https://www.pinhome.id/blog/peta-kabupaten-aceh-besar>

Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibukotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan

berwawasan luas, Banda Aceh sebagai pusat ibukota dianggap kurang efisien, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang, sehingga ibukota Kabupaten Aceh Besar selanjutnya dipindahkan ke Kota Jantho.

Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Pulau Sumatera, tergabung dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Secara astronomis Kabupaten Aceh Besar terletak antara $5^{\circ}3'1,2''$ – $5^{\circ}45'9,007''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}55'43,6''$ – $94^{\circ}59'50,13''$ Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Besar adalah 2.903,50 km². Sebagian besar merupakan wilayah daratan, dan hanya sebagian kecil berupa kepulauan. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa. Wilayah kecamatan yang paling luas adalah Seulimeum yang meliputi 404,35 km² atau lebih dari 13,93 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar. Kecamatan dengan wilayah paling kecil adalah Krueng Barona Jaya, luasnya 6,96 Km² atau hanya 0,24 persen dari luas Kabupaten Aceh Besar.

Tabel 4.1
Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Aceh Besar

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kota Jantho	593,00
2	Seulimeum	404,35
3	Lhoong	149,03
4	Lhoknga	87,95
5	Leupung	169,15
6	Indrapuri	197,04
7	Kuta Cot Glie	332,25
8	Lembah Seulawah	319,60
9	Mesjid Raya	129,93
10	Darussalam	38,43
11	Baitussalam	20,84
12	Kuta Baro	61,07
13	Montasik	59,73
14	Blang Bintang	41,76
15	Ingin Jaya	24,34
16	Krueng Barona Jaya	6,96
17	Suka Makmur	43,45
18	Kuta Malaka	22,82
19	Simpang Tiga	27,59
20	Darul Imarah	24,35
21	Darul Kamal	23,04
22	Peukan Bada	36,25
23	Pulo Aceh	90,56
Aceh Besar		2.903,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2023

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2021 adalah sebanyak 409.535 jiwa dengan RJK (Rasio Jenis Kelamin) sebesar 100. Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,98% dari tahun 2020. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2010-2020 adalah sebesar 1,40%. Kabupaten Aceh Besar memiliki kepadatan penduduk rendah yaitu 141 jiwa/km².

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk di Kabupaten Aceh Besar

Jumlah Penduduk (Jiwa)		
2020	2021	2022
405 535,00	409 535,00	414 490,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, 2023

2. Profil Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar



Gambar 4.2 Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar

Sumber: Kantor Dinas Sosial, 2023

Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar terletak di Jantho Makmur, Kabupaten Aceh Besar. Dinas sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Susunan organisasi Dinas Sosial Aceh Besar terdiri dari ;

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Sub Bagian Umum
4. Sub Bagian Keuangan
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
6. Bidang Rehabilitasi Sosial

7. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
8. UPTD
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1		1
2	Sekretaris Dinas	1		1
3	Kabid Rehabilitasi Sosial	1		1
4	Pekerja Sosial Ahli Muda	4	1	5
5	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	1		1
6	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda		1	1
7	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin		1	1
8	Pengadministrasi Persuratan		1	1
9	Pengelola Kesejahteraan Sosial		1	1
10	Kasubbag Umum	1		1
11	Penyusun Laporan Keuangan		2	2
12	Pengolah Data	3		3
13	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	1		1
14	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1		1
15	Pengadministrasi Umum	1		1
16	Pranata Kearsipan	1		1
17	Pengadministrasian Keuangan	1		1
18	Pranata Jamuan		1	1

Sumber: Data Dinas Sosial, 2023

Tabel 4.4
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	4
2	SLTP	1
3	SLTA	4
4	D-IV	2
5	S1	8
6	S2	7

Sumber: Data Dinas Sosial, 2023

Tabel 4.5
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	I/a	-
2	I/b	-
3	I/c	3
4	I/d	-
5	II/a	2
6	II/b	1
7	II/c	1
8	II/d	1
9	III/a	2
10	III/b	1
11	III/c	2
12	III/d	8
13	IV/a	2
14	IV/b	1
15	IV/c	1

Sumber: Data Dinas Sosial, 2023

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- 3) Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur;
- 4) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial;

- 5) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya bidang kesejahteraan sosial;
- 6) Pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat di bidang kesejahteraan sosial; dan
- 7) Pelaksanaan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas.

Agar dapat menjalankan fungsi dan tugas pokok di atas maka pemerintah memberikan kewenangan kepada Dinas Sosial Aceh yaitu:

- 1) Melakukan penelitian dan pengkajian dibidang kesejahteraan sosial yang mencakup wilayah provinsi;
- 2) Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan masyarakat bidang kesejahteraan sosial;
- 4) Melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan kesejahteraan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pengembangan potensi kesejahteraan sosial;
- 5) Memberikan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta perencanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
- 6) Memberikan bantuan dan jaminan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial khusus akibat konflik, bencana alam dan bencana sosial;
- 7) Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;

- 8) Melaksanakan pengawasan penempatan pekerja sosial dan fungsional panti sosial; dan
- 9) Mengalokasi sumber daya manusia potensial.

Kepala Dinas Sosial, mempunyai tugas melakukan tugas umum tentang rehabilitasi pelayanan, bantuan sosial sesuai peraturan yang berlaku untuk mendukung tugas pokok Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi, yaitu:

- 1) Pelaksana urusan ketatausahaan Dinas
- 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- 3) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta valuasi dibidang kesejahteraan sosial
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya
- 5) Pembinaan UPTD
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan serta ketatalaksanaan di lingkungan Dinas Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris mempunyai fungsi, yaitu:

- 1) Pengelolaan administrasi keuangan
- 2) Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM), dan standar operasional prosedur (SOP)
- 3) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas pelaksana teknis dibidang rehabilitasi sosial anak dan lansia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pelaksana teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, dan korban sosial keluarga.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas pelaksanaan dibidang yang berhubungan dengan pemberdayaan PMKS, dan penanganan fakir miskin.

b. Visi dan Misi

a) Visi

Terwujudnya Masyarakat Aceh yang bermartabat dan berkesejahteraan sosial

b) Misi

- 1) Meningkatkan akses pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi; pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.
- 3) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta kemitraan dalam penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS.

- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- 5) Membangun dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif

Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga mengalami permasalahan sebagai akibat dari belum optimalnya dukungan sumber daya manusia, peran masyarakat, dan dukungan pendanaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, sehingga

diharapkan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial yang ada di kabupatennya. Hal ini merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

1) Sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan program usaha ekonomi produktif.

Peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberian bantuan usaha ekonomi produktif adalah untuk mengatur dan memastikan bahwa program-program yang disediakan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Pemerintah menetapkan kebijakan, aturan, dan regulasi yang jelas terkait dengan bantuan usaha ekonomi produktif agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif serta mampu melindungi kepentingan para pelaku usaha.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial juga mengatur bagaimana

penyelenggaran tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada: perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat”. Dan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi”. Dalam hal ini, sebagaimana dalam wawancara peneliti dengan sekretaris Dinas Sosial Aceh Besar:

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan adanya Peraturan pemerintah tersebut kami selaku dinas sosial melaksanakan program-program yang dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat di Aceh Besar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Aceh Besar sudah mempunyai peraturan pemerintah yang secara jelas mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dengan berlandaskan Peraturan Pemerintah tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar melaksanakan program-program yang dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut yang dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial khususnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan guna mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat Indonesia.

Adapun peran pemerintah sebagai regulator dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu bagaimana pemerintah membuat regulasi tentang percepatan pembangunan melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Berdasarkan indikator regulator pada peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait mengenai apa yang menjadi dasar aturan pemerintah sebagai peran regulator, sebagaimana wawancara peneliti dengan sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar mengatakan bahwa:

Peran pemerintah dalam regulasi itu sendiri dihadirkan melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Jadi, peraturan ini adalah bukti keseriusan dari pemerintah terhadap masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah.

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah.

2) Sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberian bantuan usaha ekonomi produktif adalah membantu memfasilitasi pelaku usaha agar mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap bantuan tersebut. Pemerintah dapat memberikan pendanaan atau pemodalan, dan pendampingan sosial kepada masyarakat sehingga penerima bantuan dapat mengoptimalkan potensi bisnisnya.

Adapun program yang diupayakan pemerintah dalam memajukan pembangunan ekonomi yaitu program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program bantuan usaha ekonomi produktif merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan fakir miskin oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dengan memberikan bantuan modal usaha berupa alat dan bahan untuk usaha yang akan di geluti, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pada awal tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar menerima dana bantuan dari Kementerian Sosial melalui program Usaha Ekonomi Produktif yang diperuntukkan bagi fakir miskin yang sudah mempunyai usaha kecil sebelumnya. Program bantuan modal usaha ekonomi produktif merupakan salah satu program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana wawancara pneliti dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar mengatakan bahwa:

Kami mempunyai beberapa program bantuan salah satunya adalah program bantuan usaha ekonomi produktif, tujuannya untuk membantu masyarakat yang ekonominya lemah agar dapat meningkatkan usahanya. Jadi usaha ekonomi produktif itu adalah bantuan stimulan berupa modal yang diberikan oleh kepada fakir miskin bagi yang sudah memiliki usaha kecil sebelumnya. Tujuan usaha ekonomi produktif adalah kemandirian kita ingin fakir miskin mandiri dengan pemberian modal usaha sehingga dapat terlepas dari kemiskinan.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program usaha ekonomi produktif. Tentu ini merupakan langkah pemerintah yang tepat dengan adanya bantuan ini masyarakat lebih berdaya dan menciptakan lapangan kerja dengan cara berdagang dengan adanya modal tersebut. usaha ekonomi produktif merupakan bantuan pancingan yaitu berupa modal usaha agar

mereka dapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Upaya Pemerintah melalui bantuan modal usaha ini merupakan salah satu wujud harapan agar fakir miskin dapat terbebas dari kemiskinan. Tujuan Usaha Ekonomi Produktif ini sendiri adalah kemandirian artinya adanya bantuan modal ini fakir miskin menjadi mandiri sehingga dengan kemandiriannya dapat terlepas dari kemiskinan.

Adapun mekanisme Penyaluran bantuan modal usaha ekonomi produktif oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai berikut:

a. Pendataan

Pelaksana program usaha ekonomi produktif oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar harus tepat sasaran, maka penerima bantuan modal usaha ekonomi produktif harus dilakukan pendataan secara baik, sistematis dan melihat langsung apakah sudah sesuai dengan data yang diterima. Dinas Sosial dalam menjalankan kegiatan program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan usaha ekonomi produktif, melakukan koordinasi atau kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Aceh dalam hal pendataan masyarakat bahwa bantuan usaha ekonomi produktif untuk masyarakat miskin yang mempunyai usaha dan perlu dibantu dalam hal permodalan untuk di data dan diseleksi kelayakannya untuk menerima bantuan.

b. Peninjauan

Pada tahap ini peninjauan dilakukan untuk menyesuaikan data yang diterima dengan kenyataan di lapangan.

c. Sosialisasi

Sosialisasi adalah cara yang diadakan pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk menjelaskan maksud dari kegiatan tersebut, dan biasanya dilakukan dalam bentuk pendidikan, pengetahuan dan bimbingan teknis dari kegiatan tersebut. Begitu pula dengan program kegiatan usaha ekonomi produktif. Pada tahap ini, penerima bantuan usaha ekonomi produktif diwajibkan mengikuti sosialisasi atau bimbingan teknis sebelum bantuan diberikan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa bantuan usaha ekonomi produktif ditujukan untuk modal usaha dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara mengelola usaha dengan baik agar masyarakat menjadi lebih mandiri. Kesadaran akan potensi yang dimiliki setiap orang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan keterampilan yang ada serta memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar masyarakat itu sendiri, seperti memanfaatkan ampas kopi sebagai kompos, memanfaatkan masyarakat lain sebagai tenaga kerja dalam usaha yang dijalankan dan memanfaatkan lokasi sebagai kawasan strategis untuk dikunjungi orang dari luar daerah.

d. Pendampingan Sosial

Pada tahap ini, setelah barang bantuan diterima oleh pelaku usaha, ada pendampingan yang dilakukan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Sosial selaku pelaksana kegiatan. Tujuan dari pendampingan sosial ini adalah untuk meningkatkan motivasi, kemampuan, dan peran masyarakat yang diberdayakan sehingga mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Adapun mekanisme penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif sebagaimana wawancara peneliti

dengan kepala bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar mengatakan bahwa:

Untuk mekanisme penyaluran bantuan UEP yang pertama dilakukan pendataan, setelah diidentifikasi calon penerima manfaat bahwa benar mempunyai embrio usaha maka akan dilakukan assessment oleh pilar-pilar sosial atau tim assessment yang ditunjuk, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi, setelah itu diberikannya bantuan, dan nanti akan ada juga monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa mekanisme penyaluran bantuan usaha ekonomi produktif dilakukan dengan beberapa tahap. Pilar-pilar sosial yang dimaksud yaitu relawan di tingkat kecamatan dan desa atau yang disebut dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Adapun jenis-jenis bantuan dalam usaha ekonomi produktif yaitu sebagai berikut:

- 1) Perlengkapan menjahit
- 2) Perlengkapan membuat kue
- 3) Perlengkapan kuliner nasi
- 4) Perlengkapan jualan kios
- 5) Perlengkapan jualan kopi

Tabel 4.6

Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif di Kecamatan Seulimeum

No	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima
1	Perlengkapan Menjahit	5
2	Perlengkapan Membuat Kue	22
3	Perlengkapan Kuliner Nasi	27
4	Perlengkapan Jualan Kios	4
5	Perlengkapan Jualan Kopi	24
Total		82

Sumber: Data Dinas Sosial, 2023

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar mengatakan bahwa:

Bantuan ini banyak jenisnya ada yang menjahit, membuat kue, jualan kopi, jualan kios dan sebagainya. Program bantuan usaha ekonomi produktif ini kami berikan dalam bentuk barang yang total harga plus pajaknya itu 5 (lima) juta perorang.

Tabel 4.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Aceh Besar

No	Indikator	Realisasi Pencapaian Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase yang memperoleh bantuan UEP	0,31	0,68	2,06	4,51	4,55
2	Jumlah penerima bantuan UEP	40	100	289	722	774

Sumber: Data Dinas Sosial, 2023

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa bantuan usaha ekonomi produktif dimulai dari tahun 2018 dengan jumlah penerima bantuan 40 kartu keluarga (KK), pada tahun 2019 berjumlah 100 kartu keluarga (KK), tahun 2020 berjumlah 289 kartu keluarga (KK), tahun 2021 berjumlah 722 kartu keluarga (KK), dan tahun 2022 berjumlah 774 kartu keluarga (KK). Jumlah penerima bantuan usaha ekonomi produktif setiap tahun bertambah.

Usaha Ekonomi Produktif yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar sangat bermanfaat bagi penerima. Dengan adanya program tersebut ekonomi masyarakat lebih baik lagi dari sebelum mendapatkan bantuan program usaha ekonomi produktif. Tujuan usaha ekonomi produktif sendiri yaitu memberikan modal usaha, modal usaha ini diharapkan terus berputar untuk meningkatkan penghasilannya. Sebagaimana wawancara peneliti dengan AM

selaku penerima bantuan usaha ekonomi produktif jenis membuat kue mengatakan bahwa:

Tahun 2021 saya dapat bantuan modal dari Dinas Sosial dan Alhamdulillah dengan adanya program usaha ekonomi produktif ini usaha saya menjadi lancar.

Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh MD selaku penerima bantuan usaha ekonomi produktif jenis menjahit:

Saya juga penerima bantuan usaha ekonomi produktif tahun lalu, menurut saya bantuan ini memberikan manfaat dan membuat usaha lancar. Alhamdulillah dampaknya adalah bantuan usaha ekonomi produktif ini saya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal yang sama Juga disampaikan oleh MZ selaku penerima bantuan usaha ekonomi produktif jenis jualan kopi mengatakan:

Tahun 2021 saya menerima bantuan ekonomi produktif untuk jualan kopi. Bagi saya bantuan ini sangat bermanfaat. Karena untuk membuka warung kopi saya membutuhkan modal yang tidak sedikit. Dengan adanya bantuan ini saya dapat meningkatkan penghasilan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di atas, bahwa dengan adanya bantuan usaha ekonomi produktif memberikan dampak yang baik terutama bagi penerima. Dampaknya yaitu kesejahteraan hidup mengalami peningkatan dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Indikator pertama dalam kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan dan peningkatan produktivitas kerja.

3) Sebagai Dinamisor

Pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan

melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan

Keberhasilan bantuan usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada penerima bantuan juga ditentukan oleh pendamping. Pendamping adalah penentu keberhasilan karena melalui pendampingan penerima dapat memperoleh bimbingan dan arahan dari pendamping untuk mencapai keberhasilan usaha serta mendayagunakan sumber dan potensi dalam rangka pemenuhan kebutuhan.

Pendampingan sosial adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan penerima bantuan usaha ekonomi produktif dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas pelayanan publik lainnya. Pendamping usaha ekonomi produktif adalah seseorang yang memiliki kemampuan melakukan pendampingan kepada fakir miskin usaha ekonomi produktif sejak awal sampai akhir pemberian bantuan usaha ekonomi produktif .

Menjadi pendamping usaha ekonomi produktif tidak boleh sembarangan oleh karena itu dibutuhkan pendamping yang profesional dan memiliki kemampuan dan kualitas yang baik sehingga dapat bertanggungjawab dan membimbing penerima bantuan menjadi efektif bagi perbaikan kondisi sosial dan ekonominya. Proses seleksi awal pendamping Dinas Sosial dan Provinsi melakukan seleksi awal secara administrasi terlebih dahulu kepada peserta yang

mendaftar berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Pendamping adalah kunci dari keberhasilan pelaksanaan bantuan usaha ekonomi produktif. Pendamping memiliki peran yang sangat penting, oleh karena itu penerimaan calon pendamping adalah tidak main-main dan memang dibutuhkan orang-orang yang profesional dan memiliki kemampuan dan kualitas yang baik. Bentuk-bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pendamping adalah sebagai berikut:

- a. Pendamping melakukan verifikasi dan memvalidasi Data Pendamping melakukan kegiatan untuk menentukan calon penerima yang memiliki kriteria yang sesuai dengan persyaratan yang ada. Verifikasi berdasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT).
- b. Pendampingan untuk mendapatkan bimbingan pengelolaan bantuan, pelaksanaan pengembangan usaha, serta kendala- kendala dalam menjalankan bantuan.

4.2.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif

Pembangunan yang berpusat pada manusia menekankan bahwa pembangunan bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah pada upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan cara yang dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang mampu untuk mandiri dalam mewujudkan potensi yang ada

didalam dirinya agar dapat memperbaiki kehidupannya kedepan. Hal yang terpenting dari adanya pemberdayaan masyarakat ialah mencoba mengembangkan rasa keefektifan politis yang akan mengubah penerima pasif dan reaktif menjadi peserta aktif yang memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan, masyarakat yang aktif dan berkembang yang dapat turut serta dalam memilih isu kemasyarakatan.

Pada setiap proses pelaksanaan dari pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam berjalannya program ini, antara lain: Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usahanya, lemahnya pendamping dalam menjalankan fungsinya termasuk mengawasi dan memantau usaha pada masyarakat, belum selektif dalam memilih sasaran penerima bantuan modal usaha yang masuk dalam kategori miskin, kecilnya sarana pemasaran dalam memasarkan hasil usaha, kurangnya kerjasama antar instansi termasuk instansi setempat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, baik dalam proses rekrutmen, pemasaran, serta pengawasan.

Dalam proses pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) masih terdapat hambatan dan kendala sehingga pemenuhan kesejahteraan masyarakat belum maksimal. Hal ini terjadi antara lain disebabkan minimnya Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi serta untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penetapan calon penerima bantuan sosial belum valid atau akurat, sehingga ketepatan penerima bantuan sosial belum tepat sasaran.

Sehubungan dengan hambatan dan kendala Dinas Sosial dalam memberikan bantuan usaha ekonomi produktif, masih ditemukan beberapa penerima yang tidak termasuk dalam kategori miskin. Secara umum, bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar sudah sesuai aturan, namun ada beberapa penerima dari program bantuan usaha ekonomi produktif yang tidak tepat sasaran, yaitu sebagai masyarakat miskin, dan ditemukan kendala dalam memanfaatkan bantuan, karena setahun setelah berjalan, bantuan tersebut hilang atau diperjual belikan.

Hal ini terjadi karena minimnya anggaran untuk melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan penetapan calon penerima bantuan sosial belum valid atau akurat, sehingga ketepatan penerima bantuan sosial belum tepat sasaran. Sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak Munawar selaku kepala bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan program program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tentu memang ada kendala baik di tingkat Kabupaten, di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Gampong. Kendala tersebut dapat dilihat dari luas wilayah Kabupaten Aceh Besar yang memiliki 23 kecamatan dan 604 gampong, dengan jumlah penduduk 422.241 ribu jiwa, dengan jumlah masyarakat 60,26 ribu jiwa, maka anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar, terutama untuk kegiatan bantuan, pemberdayaan sosial, sosialisasi, pendataan atau verifikasi, dan validasi data keluarga miskin yang diwajibkan tersedianya dana melalui Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dalam proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial juga membutuhkan petugas sosialisasi disetiap desa, sehingga mampu mendapatkan data yang akurat/valid demi ketepatan sasaran calon penerima bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

belum tepatnya sasaran bantuan modal usaha ekonomi produktif dipengaruhi oleh kurangnya data usaha, masih banyaknya oknum yang melakukan

nepotisme dalam penyaluran bantuan sehingga masyarakat miskin yang benar-benar memiliki embrio usaha tidak mendapatkan bantuan.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan MD selaku penerima bantuan mengatakan bahwa:

Bantuan yang diberikan pihak Dinas Sosial banyak yang tidak tepat sasaran, kebanyakan penerima bantuan tersebut yaitu keluarga ataupun kerabat keuchik, ada keluarga yang tidak memiliki embrio usaha mendapatkan bantuan 2 (dua) kali selama dua tahun berturut, sedangkan keluarga miskin yang memiliki embrio usaha tidak mendapatkan bantuan sekalipun.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pilar-pilar sosial belum selektif dalam memilih sasaran penerima bantuan modal usaha ekonomi produktif. Menurut hasil wawancara peneliti, masih banyak masyarakat miskin yang memiliki embrio usaha namun tidak mendapatkan bantuan. Tim verifikasi tidak melaksanakan verifikasi data dan uji petik lapangan tentang kebenaran data yang diajukan. Masih banyak penerima bantuan usaha ekonomi produktif di Kecamatan Seulimeum yang tidak dilakukan verifikasi uji lapangan.

Belum sepenuhnya dilakukan pendampingan sosial salah satu penyebab utamanya dikarenakan keterbatasan anggaran yang menyebabkan pemerintah kesulitan untuk menyediakan sumber daya manusia tambahan sebagai tenaga pendamping.

Pendampingan sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan program bantuan usaha ekonomi produktif yaitu membantu meningkatkan kemampuan bisnis. Dengan adanya pendampingan sosial, para pengusaha kecil dan menengah akan lebih mudah mengasah keterampilannya sehingga mampu meningkatkan kemampuan bisnisnya. Pemberian modal saja belum cukup efektif jika tanpa

adanya pendampingan atau pelatihan agar para pelaku usaha bisa memaksimalkannya dengan baik.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

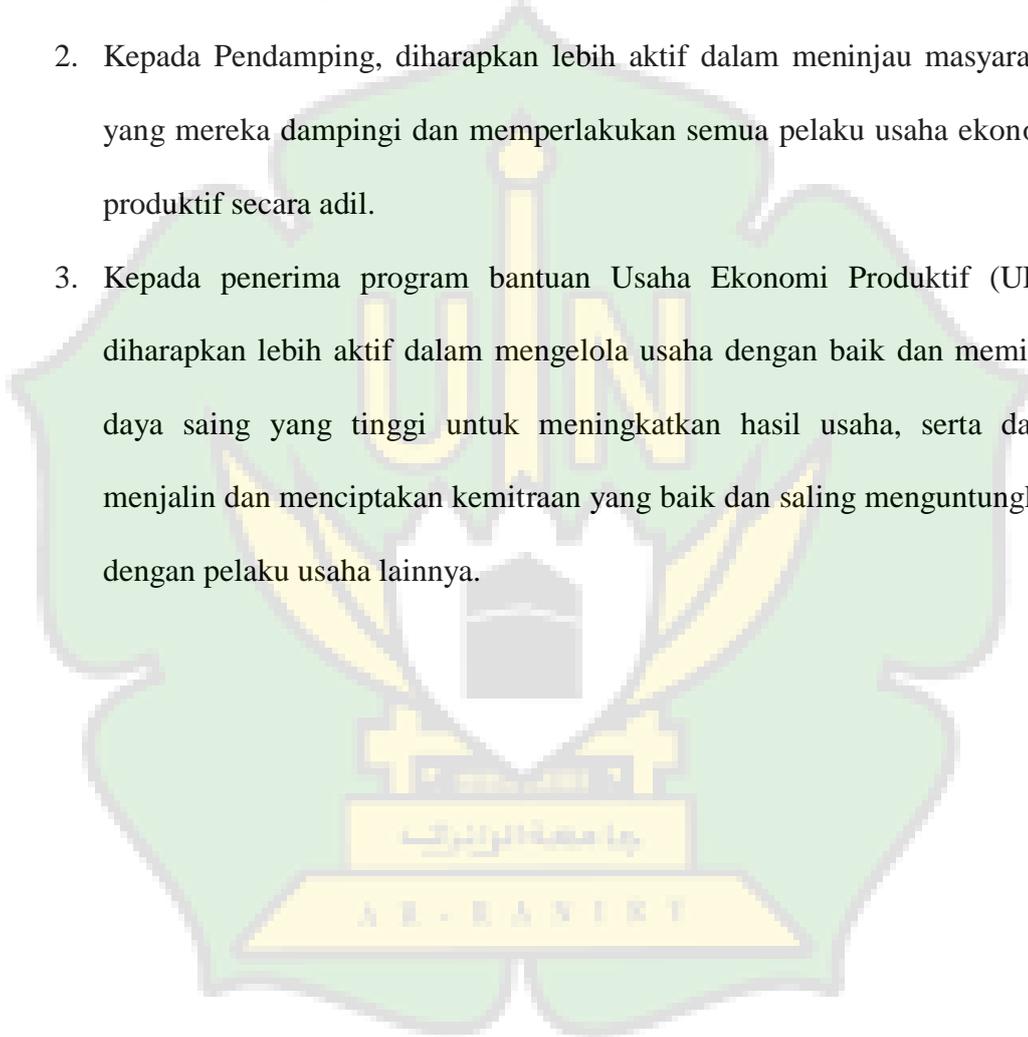
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif, maka peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mekanisme penyaluran bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif yang diberikan Dinas Sosial langsung ke masyarakat antara lain: pendataan yang dilakukan Dinas Sosial untuk menyeleksi kelayakan calon penerima bantuan, sosialisasi atau bimbingan guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara mengelola usaha dengan baik, dan pendampingan sosial untuk meningkatkan motivasi serta kemampuan masyarakat yang diberdayakan.
2. Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yaitu sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator. Peran yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat bagi penerima bantuan.
3. Hambatan dalam pelaksanaan program bantuan Usaha Ekonomi produktif diantaranya yaitu: kurangnya alokasi dana dari pemerintah, belum selektif dalam memilih sasaran penerima bantuan modal usaha yang masuk dalam kategori miskin.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar kedepannya untuk lebih memilih sasaran penerima yang benar termasuk kategori miskin.
2. Kepada Pendamping, diharapkan lebih aktif dalam meninjau masyarakat yang mereka dampingi dan memperlakukan semua pelaku usaha ekonomi produktif secara adil.
3. Kepada penerima program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diharapkan lebih aktif dalam mengelola usaha dengan baik dan memiliki daya saing yang tinggi untuk meningkatkan hasil usaha, serta dapat menjalin dan menciptakan kemitraan yang baik dan saling menguntungkan dengan pelaku usaha lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Ahmad. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Remika cipta.
- Ardito Bhinadi. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Basri. A. 2005. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema insani Press.
- Djaman Satori. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Fahrudin, A. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Heroepoetri, Arimbi,Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Isbandi Rukminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Moleong, j. Lexy. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musfiqon. 2012. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Public Publisher.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan edisi ketiga*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antari Press.
- Saldana. Humberman dan Miles. 2014. *Analisis data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soejono, Soekanto, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Bumi aksara.
- Soetanyo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Grasindo.
- Sohardono, Edi. 2012. *Teori Peran*. Jakarta: PT. Gramedia.

Sri Edi Suwarsono. 2007. *Sekitar kemiskinan dan keadilan*. Jakarta : Cendikiawan Tentang Islam UI Press.

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Wijaya. Hengki & Helaluddin. 2019. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Jurnal atau Skripsi:

Chriswardani. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional Understanding Multidimension Of Poverty*, JMPK. Vol. 08. No. 03.

Jannah, Raudhatul. & Fahmi, Chairul. *Kualifikasi Bankable Bagi Pelaku UMKM Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Pasca Pemberlakuan Qanun LKS Dalam Perspektif Maqhasid Syariah (Studi Terhadap Pedagang Pasar Sibreh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2023.

Kadek Dina Indriani. 2017. *Analisis Pemanfaatan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Buleleng Tahun 2011-2015*, (e-journal Jurusan Pendidikan Ekonomi Vol: 10 No: 2.

Natalia, Intan Indra. 2016. *Kajian Tingkat Kesejahteraan dan Pendidikan Anak Petani Salak Pondoh di Desa Pekandangan Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara*. Skripsi Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Raif. 2019. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Petani Rumput Laut*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Syawie, dkk. 2018. *Pengaruh Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Terhadap Tingkat Kemandirian Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Pesisir*. Jakarta : Pusat

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*, Pasal 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 *Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, Pasal 2 ayat 1.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 *Tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin*, Pasal 1.

Artikel/Website Resmi Pemerintahan :

Data jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran diambil dari <https://acehbesarkab.bps.go.id> pada 1 Juni 2023.

Peta Kabupaten Aceh Besar diakses melalui website <https://www.pinhome.id/blog/peta-kabupaten-aceh-besar> pada 1 Juni 2023.

Profil Kabupaten Aceh Besar diakses melalui website resmi <https://acehbesarkab.go.id> pada 1 Juni 2023.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial diakses melalui <https://dinsos.acehprov.go.id> 30 Mei 2023.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 585/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **02 Februari 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A.	Sebagai pembimbing I
2. Hijrah Saputra, S.Pd.I., M.Sos.	Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama	: Reishanda
NIM	: 190802076
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Judul	: Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditandatangani di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 01 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,
MULI MULIA

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-0878/Un.08/FISIP. I/PP.00.9/03/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar
2. Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **REISHANDA / 190802076**
 Semester/Jurusan : / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Ds. Lamjrueu, Kec. Seulimeum, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 April 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29
 September 2023*

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS SOSIAL

Jl. T. Bachtiar Panglima Polem, SH - Kota Jantho Kode Pos 23911
Telp. (0651) 92024 Fax. (0651) 92045 Email : Dinsos.abes@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 460/543/DINSOS/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BHRUL JAMIL, S.Sos, M.Si
Nip : 19680603 199011 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/ NIM : REISHANDA / 190802076
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Ds. Lamjrueu, Kec. Seulimeum, Aceh Besar
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Telah selesai melakukan penelitian ilmiah pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar dengan judul "*Peran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif*".

Demikian untuk dimaklumi dan seperlunya terimakasih.

Kota Jantho, 05 Mei 2023

a.n. **KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH BESAR**

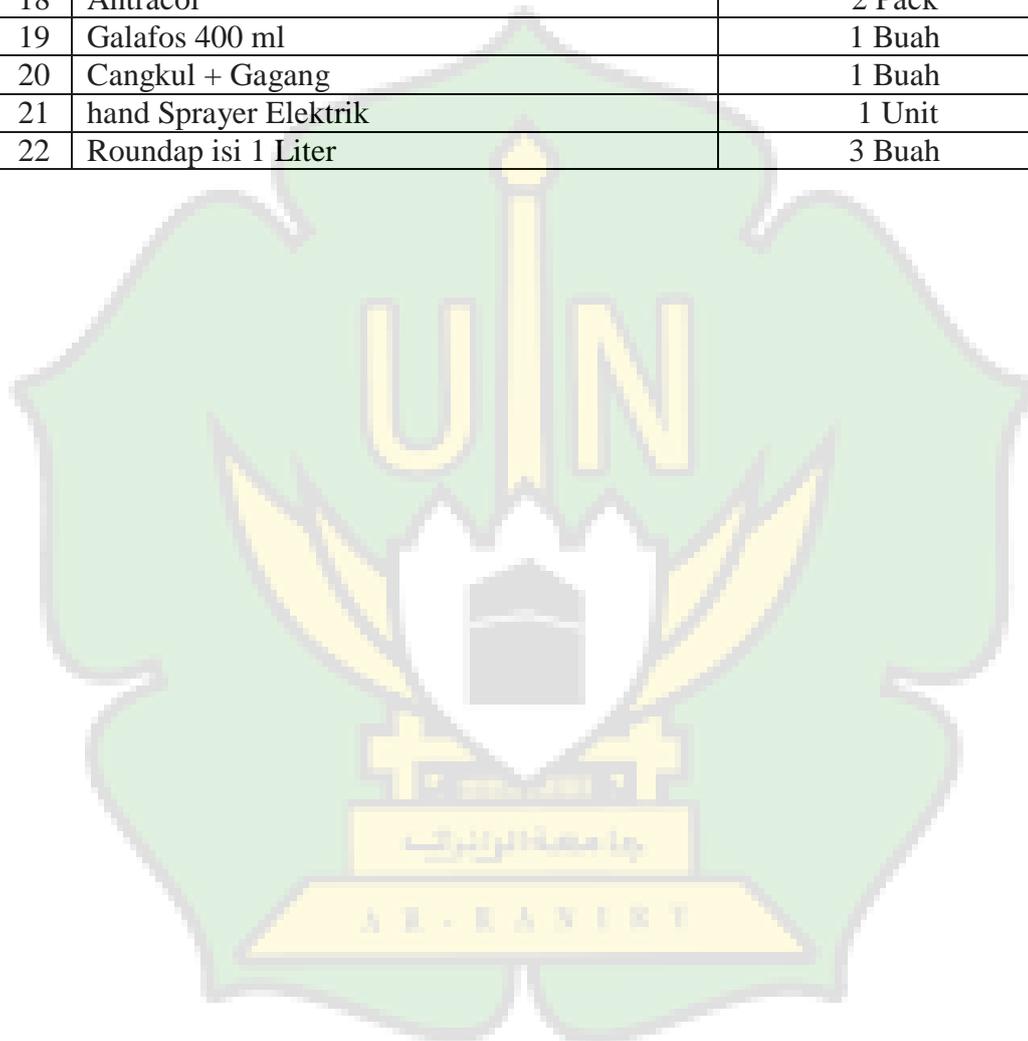
Aulia Rahman, S. STP, M. Si
Pembina,
NIP. 19850808 200412 1 002

Lampiran 4. Rincian Barang Bantuan Usaha Ekonomi Produktif

No	Nama Barang	Volume/Satuan
1. UEP Jualan Kios		
1	Gula Pasir Kristal Putih	50 Kg
2	Minyak Goreng Kemasan Isi Liter	12 Liter
3	Deterjen Daia 1000	2 Dus
4	Mie Instan Indomie Soto Medan	5 Dus
5	Mie Instan Mie Sedap	4 Dus
6	Sabun Cuci Piring Sunlight 210 ml	1 Dus
7	Fanta Isi 390 ml	2 Lusin
8	Sprite Isi 390 ml	2 Lusin
9	Mon Tea	3 Kotak
10	Sirup Cap Patung	1 Lusin
11	Sirup ABC	1 Lusin
12	Pop Mie	1 Kotak
13	Pasta Gigi Pepsodent 75 gr	24 Buah
14	Sabun Mandi Lifebuoy Sabun Batang	24 Buah
15	Sikat Gigi Formula Bulu Sikat Lembut	24 Buah
16	Shampoo Kemasan Botol	10 Botol
17	Kopi Robusta	5 Kg
2. UEP Membuat Kue		
1	Oven Aluminium Merk Hock No.3	1 Buah
2	Loyang/Cetak Kue Aluminium	1 Buah
3	Ampia Stainless	1 Buah
4	Mixer Miyako	1 Buah
5	Tempat Adonan Kue Stainless 24 cm	1 Buah
6	Kukusan Aluminium Ukuran 40 cm	1 Buah
7	Gula Pasir Kristal Putih	50 Kg
8	Tepung Terigu Segitiga Biru I kg	24 Kg
9	Tepung Ketan Rose Brand 500 gr	10 Kg
10	Tepung Beras Rose Brand 500 gr	20 Kg
11	Minyak Goring Kemasan 1 Liter	12 Liter
12	Mentega Palmia Kemasan Sachet 200 gr	12 Buah
13	Timbangan 5 Kg	1 Buah
14	Kompas Gas Turbo Seribu Api 1 Tungku	1 Buah
15	Wajan Aluminium Ukuran 28 Inch	1 Buah
3. UEP Menjahit		
1	Mesin Jahit Singer Type M1155	1 Unit
2	Meja Mesin Jahit	1 Unit
3	Jarum Mesin Singer No 11	1 Bungkus

4	Jarum Mesin Singer No 13	1 Bungkus
5	Jarum Mesin Singer No 14	1 Bungkus
6	Jarum Jahit Regal	2 Pcs
7	Gunting Benang Type 805G Stainless	2 Pcs
8	Cutting Mat/Alas Pemotong Ukuran A1	1 Buah
9	Benang Jahit Yamalon Isi 12 Pcs	8 Lusin
10	Pisau Penggaris Isi 1 Gagang+5 Refill	2 Buah
11	Gunting Bahan 8 Butterfly	2 Buah
12	Gunting Bahan 9 Butterfly	2 Buah
13	Gunting Bahan 10 Butterfly	2 Buah
14	Kapur Pola Jahit	3 Kotak
15	Minyak Pelumas Singer	3 Botol
16	Penggaris Pola/Penggaris Lengkung No 1 Dan 2	2 Set
No Nama Barang Volume/Satuan		
4. Uep Kuliner Nasi		
1	Tabung Gas Bright Gas 5,5 Kg + Isi, SNI	1 Buah
2	Selang + Regulator Merk UTU, SNI	1 Buah
3	Penanak Nasi Ukuran 6 Liter	1 Buah
4	Kompor Gas Kompor Turbo Seribu Api 1 Tungku	1 Buah
5	Wajan Aluminium ukuran 28 Inch	1 Buah
6	Piring Milamin ukuran 9	2 Lusin
7	Gelas Teh	2 Lusin
8	Garpu Stainless	2 Lusin
9	Sendok Makan Stainless	2 Lusin
10	Blender Merk Miyako 2 in 1 Plastik	1 Buah
11	Centong Nasi Stainless Tebal	1 Buah
12	Minyak Goreng Kemasan Isi 1 Liter	12 Liter
13	Saus Sambal ABC	12 Buah
14	Kecap Manis ABC	12 Botol
No Nama Barang Volume/Satuan		
5. UEP Palawija		
1	Mulsa Plastik 120 x 500	1 Gulung
2	Pupuk NPK Laoying 16 x 3 (50Kg)	1 Zak
3	Metro Besar	2 Buah
4	Regent	2 Buah
5	Virtako 100 ml	1 Botol
6	Dithane	5 Buah
7	Polibag Cabai	5 Kg
8	Polybag 8 x 10	3 Kg
9	Kurater	2 Buah
10	Besvidan Kecil	2 Buah

11	Bambu Ijo	20 Buah
12	Gibro	20 Buah
13	Benih Terong Ungu	1 Sachet
14	Cabai Bibit Expander	1 Sachet
15	Bibit Gambas	1 Sachet
16	Bibit Kacang Panjang	1 Sachet
17	Bibit Cabai rawit Zara	1 Sachet
18	Antracol	2 Pack
19	Galafos 400 ml	1 Buah
20	Cangkul + Gagang	1 Buah
21	hand Sprayer Elektrik	1 Unit
22	Roundap isi 1 Liter	3 Buah



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Aulia Rahman selaku sekretaris Dinas Sosia Kabupaten Aceh Besar



Wawancara dengan Bapak Munawar, SKM, M,Si selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar



Wawancara dengan Ibu Nuraida selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar



ba

Lampiran 6. Draf Wawancara

Wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial

1. Tahun berapa program usaha ekonomi produktif mulai berjalan?
2. Ada berapa jumlah penerima bantuan modal bantuan usaha ekonomi produktif di Aceh Besar setiap tahun?
3. Dalam bentuk apa bantuan usaha ekonomi produktif diberikan kepada masyarakat?
4. Apakah bantuan usaha ekonomi produktif yang diberikan sudah tepat sasaran?
5. Apakah bantuan usaha ekonomi produktif ini dinilai berhasil?#

Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Apa faktor yang mendukung dan menghambat program bantuan usaha ekonomi produktif?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan modal usaha ekonomi produktif?
3. Apakah bantuan usaha ekonomi produktif yang diberikan sudah tepat sasaran?

Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

1. Apa saja kriteria calon penerima bantuan usaha ekonomi produktif?
2. Apakah bantuan usaha ekonomi produktif yang diberikan sudah tepat sasaran?
3. Apa faktor yang mendukung dan menghambat program bantuan usaha ekonomi produktif?
4. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan modal usaha ekonomi produktif?

Wawancara dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan:

1. Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan modal usaha ekonomi produktif?
2. Apakah bantuan usaha ekonomi produktif yang diberikan sudah tepat sasaran?
3. Apa faktor yang mendukung dan menghambat program bantuan usaha ekonomi produktif?
4. Apakah ada pelatihan dalam program usaha ekonomi produktif?
5. Apakah ada dilakukan evaluasi dan monitoring?

Wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) :

1. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima bantuan UEP?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu program UEP yang dipilih sesuai dengan kriteria?
4. Bagaimana proses terpilihnya anggota program bantuan modal usaha UEP?
5. Bagaimana proses pengelolaan modal yang diberikan kepada bapak/ibu?
6. Apakah ada pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial? Jika ada, materi apa yang diberikan?
7. Apakah ada pendamping dalam program bantuan modal UEP? Jika ada, bagaimana pendamping mendampingi atau memberikan motivasi dalam pelaksanaan program bantuan modal UEP?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang Program Bantuan Modal UEP ini?
9. Apakah bantuan ini berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi bapak/ibu?